BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh masyarakat memiliki hak atas suatu pekerjaan, karena setiap individu perlu memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup layak dengan hasil dari pekerjaan yang dilakukannya. Arti penting dari suatu pekerjaan bagi setiap individu telah tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pekerjaan menjadi salah satu hak dasar, sebab pekerjaan memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, guna memastikan agar setiap orang memiliki akses terhadap pekerjaan merupakan tanggung jawab negara. Dewasa ini, ketidakmampuan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah menyebabkan sebagian orang yang memiliki latar belakang rendahnya keterampilan ditambah rendahnya Tingkat pendidikan memilih terjun sebagai pekerja informal, seperti profesi pekerja rumah tangga, yang juga dikenal sebagai PRT.¹

Kemiskinan dan permintaan akan pekerjaan dalam sektor rumah tangga yang selama ini mengorbankan perempuan merupakan dua faktor utama

¹ Gwendolyn Ingrid Utama dan Vienna Melinda, “Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia,” *Arena Hukum* Vol. 11, No. 1 (2018): 139–62, <https://doi.org/https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/339/90789>, hlm 149.

penyebab munculnya PRT dalam kalangan masyarakat. Kaum perempuan secara dominan bekerja sebagai PRT dengan tujuan untuk memberikan kontribusi tambahan pada ekonomi keluarga mereka, bahkan menjadi penyokong utama keluarga.²

Di era modern ini, kehadiran PRT menjadi sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat di daerah perkotaan yang terpengaruh oleh revolusi industri yang memudahkan masyarakat bekerja di ruang publik.³ Kesibukan akan suatu pekerjaan membuat seseorang tidak bisa mengurus pekerjaan rumah tangga dengan efektif, sehingga diperlukanlah PRT untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Biasanya PRT akan bekerja di rumah pengguna, yang pada umumnya akan melakukan segala urusan kerumahtanggaan seperti mengurus rumah, mencuci, memasak, menyetrika, dan kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh pemberi kerja.

Negara melalui pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai perwujudan menjamin kesejahteraan warga negara. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dalam hal pekerjaan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang sudah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

² Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum," *Legislasi Indonesia* Vol. 17, No. 2 (2020): 194–208, <https://doi.org/https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/669>, hlm. 198.

³ Agusmidah, "Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No. 1 (2017): 18–25, <https://doi.org/https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/89>, hlm. 19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Tinjauan terhadap PRT sebagai tenaga kerja, merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja terkait dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa, identik dengan ranah kerja PRT yang memberikan jasa kepada pemberi kerja. Berdasarkan definisi sebagaimana demikian, seharusnya PRT juga tercakup dalam undang-undang ini. Namun secara substantif, UU Ketenagakerjaan tidak mengakui dan melindungi kelompok pekerja selain dari sektor industri.

Sementara itu di dalam UU No. 6 Tahun 2023 khususnya pada klaster Ketenagakerjaan, PRT masih juga belum mendapat porsi pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Demikian pula dalam perlindungan terhadap upah yang merupakan salah satu hak dasar bagi pekerja termasuk PRT. Belum komprehensifnya peraturan terkait perlindungan PRT ini memperlihatkan minimnya perlindungan terhadap mereka dan potensi diskriminasi yang disengaja dan dilembagakan. Padahal konstitusi, secara jelas memandatkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, apa pun profesinya karena tiap-tiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan mendapatkan hak-haknya.

Dalam menjalankan pekerjaannya, PRT masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang yang disebabkan karena adanya perbedaan hubungan kerja. Hubungan kerja ditegaskan dalam UU Ketenagakerjaan, yakni Pasal 1 angka 15, bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mencakup unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Konteks pemberi kerja yang dijelaskan dalam Pasal tersebut merujuk kepada pengusaha, sedangkan pemberi kerja dalam sektor kerumahtanggaan disebut dengan pengguna. Pengguna jasa bisa tergolong pemberi kerja, namun tidak bisa diartikan sebagai pengusaha yang dimaksud dalam UU.⁴ Karena itulah hubungan kerja PRT dengan pemberi kerjanya tak termasuk dalam cakupan hubungan kerja yang dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan.

Secara khusus, wujud perlindungan bagi PRT di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PPRT). Pada Pasal 1 angka 1, PRT didefinisikan sebagai orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

Sebelum memulai pekerjaan, para pihak diwajibkan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai hal ini, pada Pasal 5 Permenaker PPRT telah

⁴ Luh Putu Try Aryawati, “Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018), hlm. 4.

menegaskan penggunaan jasa dan PRT wajib dijalin dengan adanya perjanjian tertulis ataupun lisan yang menuangkan kewajiban serta hak-hak yang dapat dipahami kedua belah pihak. Dalam pasal tersebut, kata wajib menjadi kabur karena adanya pemberian pilihan melakukan perjanjian secara lisan. Kesepakatan kerja yang hanya dijalin sebatas tuturan lisan dengan pemahaman dasar akan peran masing-masing menyebabkan kejelasan mengenai hak PRT seperti upah yang diterimanya belum terang.⁵

Pengakuan melalui regulasi ini penting untuk diperkuat dan diperluas lagi mengingat Peraturan Menteri bersifat terbatas pada pengakuan dan belum menyentuh dimensi perlindungan yang lebih substantif. Lebih jauh, Permenaker tidak memiliki payung hukum yang lebih tinggi setingkat Undang-Undang. Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah biasanya dihadapi PRT dan membutuhkan perlindungan.

Ketiadaan Undang-Undang perlindungan khusus bagi PRT dapat membuat PRT semakin rentan mendapatkan ancaman dan diskriminasi dalam pekerjaannya terutama bagi PRT perempuan. Ancaman dan perlakuan seperti kekerasan baik psikis, fisik, ekonomi, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia banyak menimpa PRT Indonesia.⁶ Salah satu permasalahan yang

⁵ Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 1 (20 Agustus 2020): 89–94, <https://doi.org/https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2192>, hlm. 90.

⁶ Baby Ista Pranoto, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia," *Lex Renaissance* 7 (2022): 18, <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/24290/15462>, hlm 746.

sering dihadapi oleh PRT adalah kekerasan ekonomi berupa upah yang tidak dibayarkan ataupun upah yang rendah.⁷

Komnas perempuan dalam catatan tahunan pada periode 2005-2022 mengidentifikasi adanya 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT yang dilaporkan oleh lembaga layanan mitra komnas perempuan. Sementara itu pada periode tahun 2017-2022 komnas perempuan menerima pengaduan langsung sebanyak 29 kasus PRT dengan bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik hingga gaji yang tidak dibayar.⁸

Permasalahan yang terjadi adalah akibat dari depresiasi nilai pekerjaan, terutama yang banyak dilakukan oleh perempuan di dalam lingkungan rumah tangga. Pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan perempuan sebagai hak kodrati. Perempuan yang berkontribusi dalam sektor domestik tidak dinilai sebagai kaum yang produktif dan menyebabkan posisinya termarginalisasi sehingga menjadi miskin.⁹

Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab dalam memberikan kepastian terhadap jaminan perlindungan atas upah yang layak bagi PRT. Salah satu kebijakan yang didorong agar cepat disahkan adalah Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini

⁷ Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum.", *Op. Cit.*, hlm. 196.

⁸ Siaran Pers Komnas Perempuan, "Bersama Mendorong Percepatan Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga," Komnas Perempuan, 2023, <https://komnas-perempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-bersama-mendorong-percepatan-pengesahan-ruu-pelindungan-pekerja-rumah-tangga>.

⁹ Lidwina Inge Nurtjahjo Sulistyowati Iria nto, ed., *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 84.

diinginkan sebagai produk hukum untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi PRT. Namun, sejak dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI pada 2004, RUU ini belum juga disahkan.¹⁰ Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembahasannya membuat hal ini dianggap sebagai kurangnya perhatian terhadap hak konstitusional pekerja dalam sektor rumah tangga oleh para pembuat kebijakan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan terfokus terhadap pengupahan PRT yang merupakan esensi dari hubungan kerja dan permasalahan ketenagakerjaan. Sehingga dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah harus berupaya melalui kebijakannya, karena isu pengupahan memiliki dampak besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk PRT.

Mengacu pada uraian masalah sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut melalui penelitian dalam karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pengaturan Terhadap Upah Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan permasalahan tersebut, maka masalah-masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut yakni:

1. Bagaimana pengaturan terhadap upah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Peraturan Perundang-undangan saat ini?

¹⁰ Ono Haryono et al., “Kajian Kebijakan: Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga,” no. 189 (2022): 12, hlm. 10.

2. Bagaimana pengaturan kedepan terhadap upah bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka melalui penelitian ini bertujuan:

1. Untuk meneliti dan mengetahui bagaimana pengaturan terhadap upah bagi PRT dalam peraturan perundang-undangan saat ini
2. Untuk meneliti dan mengevaluasi bagaimana pengaturan upah bagi PRT di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Selain memberikan manfaat bagi penulis, diharapkan melalui penelitian ini juga mampu berguna bagi pembaca serta pihak-pihak lainnya dalam memperoleh manfaat yang positif dan menambah suatu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan memiliki dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Melalui temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang bahan pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dikemudian hari mengenai hak pekerja rumah tangga dalam hal upah. Melalui karya ilmiah ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi serta masukan bagi bidang keilmuan hukum, khususnya hukum administrasi negara berkaitan dengan ketenagakerjaan.

2. Manfaat praktis

Adapun secara praktis, manfaat yang diharapkan mampu diberikan adalah:

- a. Diharapkan dari penelitian ini mampu menambah bahan kajian untuk hukum ataupun akademik serta sebagai evaluasi bagi pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan mengenai upah bagi pekerja rumah tangga.
- b. Harapannya, dari penelitian ini mampu menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami regulasi terkait upah untuk PRT.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau multitafsir untuk memahami maksud dalam pembahasan skripsi ini. Maka dari itu penulis akan memaparkan pengertian dan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pengaturan

Pengaturan merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui pemerintah maupun lembaga terkait dalam rangka memberikan dan menjamin kesejahteraan setiap warga negara, pengaturan tersebut dituangkan dalam instrumen hukum.¹¹ Kewenangan pemerintah dalam

¹¹ Melinda, "Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *Op. Cit*, hlm. 150.

mengatur kesejahteraan warga negara harus dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis agar dapat memberikan suatu kepastian hukum.

PRT merupakan pihak yang pada saat ini memerlukan pengaturan yang mampu melindungi setiap hak para pekerja sebagai makhluk sosial sekaligus buruh dalam bentuk perundangan. Aturan mengenai upah telah ditegaskan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan tersebut juga diatur secara khusus dalam peraturan pelaksana yang terkait dengan pengupahan pekerja/buruh.

2. Upah

Upah dimaknai sebagai kompensasi yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan. Hak untuk menerima upah muncul ketika adanya jalinan hubungan kerja hingga hubungan kerja tersebut berakhir. Eggi Sudjana menjelaskan konsep upah dari perspektif ekonomi, yang secara substansial menyatakan bahwa upah mencakup segala jenis pendapatan yang diterima buruh, baik dalam bentuk uang maupun barang selama aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.¹²

Pada saat memberikan upah, pekerja harus diberikan pembayaran yang adil dan pantas sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan upah atau penghasilan yang didapat, maka seorang pekerja/buruh dapat membiayai kebutuhan hidupnya atau bahkan keluarganya.

¹² Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat, dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 89.

3. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki arti sebagai orang yang melakukan pekerjaan kepada pengguna jasa di sektor informal untuk membantu pekerjaan rumah dari pengguna jasa dengan imbalan berupa upah atau bentuk kompensasi lainnya termasuk menginap atau tidak menginap.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/ atau imbalan dalam bentuk lain”.

4. Perspektif

Melansir arti “perspektif” dari KBBI memiliki beberapa makna. Pertama, perspektif merujuk pada teknik menggambarkan objek di permukaan datar sesuai dengan dimensi tiga yang dilihat oleh mata manusia (panjang, lebar, dan tinggi). Kedua, perspektif juga merujuk pada sudut pandang atau cara seseorang melihat sesuatu.¹³

Perspektif adalah sudut pandang individu dalam memahami suatu kejadian. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki pendapat dan pandangan masing-masing ketika berhadapan dengan suatu peristiwa,

¹³ “Perspektif,” diakses 12 November 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

maka seringkali terdapat perbedaan pemahaman sehingga menimbulkan perbedaan pendapat.¹⁴

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 12 tahun 2011 Junto Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, Peraturan Perundang-undangan berwujud dokumen tertulis dengan aturannya yang mengikat bagi subjek yang general dan ditetapkan oleh Lembaga negara melalui proses-proses yang telah ditetapkan sebelumnya dalam ketentuan hukum.

Peraturan perundangan mengandung dasar-dasar hukum yang konseptual serta sifatnya luas, hal ini dengan tujuan agar menetapkan kewajiban (tindakan yang harus dilakukan), larangan (tindakan yang tidak boleh dilakukan), pembebasan (tindakan yang boleh diabaikan), atau izin (tindakan yang diizinkan). Dengan norma-norma hukum tersebut, peraturan perundang-undangan bertujuan mengatur struktur kehidupan masyarakat.¹⁵

Mengenai peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini terfokus pada upah Pekerja Rumah Tangga, oleh karena itu instrumen hukum yang digunakan adalah peraturan terkait tentang ketenagakerjaan dan terfokus pada upah pekerja/buruh.

¹⁴ Muhammad Irfan Al-Amin, "Perspektif Adalah Sudut Pandang," Katadata, 2022, diakses 12 November 2023, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya?page=all>.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya* (jakarta: Kanisius, 2013), hlm. 201.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum memiliki definisi sebagai tindakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga sehingga mereka merasa aman. Dalam hal ini, perlindungan hukum juga mengandung arti agar perlindungan kepada seluruh masyarakat dari tindakan ancaman ataupun kekerasan oleh pihak manapun menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Van Dijk dalam Eldbert Christanto berpendapat bahwa hukum harus berkontribusi dalam mencapai tujuan perdamaian. Tujuan perdamaian dapat tercapai jika Hukum memberikan sebanyak mungkin peraturan yang adil.¹⁶

Salah satu tujuan negara adalah perlindungan hukum, hal ini tertuang di pembukaan UUD NRI 1944 pada alinea keempat. UUD 1945 tersebut merupakan jaminan konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan, serta keadilan untuk seluruh rakyat, dan tak terkecuali untuk PRT.

Terkait perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon dalam Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu upaya dari pemerintah yang sifatnya preventif dan represif. Perlindungan yang preventif ditujukan guna mencegah konflik serta peran pemerintah ditempatkan sebagai pengambil

¹⁶ Eldbert Christanto Anaya Marbun, "Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)," *Dharmasiswa* Vol. 2, No. 3 (2021): 1749–60, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/8/>, hlm. 1752.

keputusan dengan bijaksana dan kehati-hatian. Di sisi lain, perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik.¹⁷

Perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai perlindungan bagi PRT atas hak pendapatannya secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif berarti negara (pemerintah) melindungi hak-hak normatif PRT melalui peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, perlindungan yang represif diartikan sebagai perlindungan atas hak PRT untuk mempertahankan hak normatifnya jika terjadi permasalahan.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam negara hukum tujuan yang ingin dicapai tentu untuk mampu melaksanakan hukum secara pantas. Gustav Radbruch mengatakan ada tiga nilai fundamental yang harus dimuat dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh Radbruch pentingnya kepastian hukum lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Hukum adalah produk yang positif.
2. Hukum didasarkan dari kenyataan.
3. Fakta yang dimasukkan dalam hukum dirunutkan dengan jelas, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan pada maknanya sehingga pelaksanaannya mudah diwujudkan.
4. Hukum tidak boleh mudah untuk diubah.

Pandangan Radbruch didasari oleh pemahaman bahwa kepastian hukum berarti kepastian itu sendiri. Radbruch berpendapat bahwa kepastian

¹⁷ Bahder Johan Naution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: CV. Mandar Maju, 2011), hlm.258.

¹⁸ Muhammad Rifqi Hidayat et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 119.

hukum adalah hasil dari hukum itu, lebih khusus lagi sebagai hasil dari perundang-undangan.¹⁹ Lon H. Fuller menyebut kepastian hukum sebagai pembentuk moralitas hukum itu sendiri. Tanpa adanya kepastian dalam hukum mengartikan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki moralitas hukum.²⁰

Undang-undang harus jelas baik pada tingkat standar maupun dalam implementasinya. Sebagaimana dikemukakan Hayek, kepastian hukum berarti hukum telah memenuhi unsur-unsur yang mampu diprediksi atau dapat diperkirakan, sehingga memungkinkan para pelaku hukum memahami aturan apa yang mengatur tindakan mereka, akan mampu memprediksi aturan mana yang akan mengatur dan bagaimana aturan tersebut akan diinterpretasikan dan ditegakkan.²¹

Berdasarkan kepastian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu produk hukum, perundang-undangan harus mengatur secara jelas muatannya. Oleh karena itu, berkenaan dengan pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perundangan, perlu adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-hak setiap orang yang terikat pada peraturan tersebut. Kejelasan hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan agar tidak adanya tindakan kesewenangan dari salah satu pihak.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), hlm. 101.

²¹ *Ibid.*, hlm. 100.

G. Orisinalitas Penelitian

Melalui penelusuran peneliti sebelumnya, ditemukan beberapa karya penelitian yang telah mengulas masalah yang sama mengenai Pekerja Rumah Tangga. Penelitian terdahulu tersebut mencakup:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Henderi Juniansyah
	Judul	Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	Penelitian ini difokuskan pada cara-cara perlindungan hukum yang diberikan kepada PRT. Perlindungan hukum terhadap PRT telah dituangkan di PERMENAKER RI No 2 Tahun 2015. Kedua belah pihak diminta membuat perjanjian dari hubungan kerja yang terjalin melalui perjanjian lisan ataupun

		dengan tertulis yang menguraikan hak serta kewajiban kedua pihak yang menjalin hubungan kerja. Adanya perjanjian ini akan memberi jaminan serta perlindungan kepada kedua pihak terkait, termasuk perlindungan hukum.
	Perbandingan	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis difokuskan pada isu upah, yaitu bagaimana pengaturan upah pekerja rumah tangga dalam regulasi nasional yang berlaku saat ini, khususnya yang terkait dengan pengaturan upah pekerja/buruh secara umum.
2.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Anggun Mayrani
	Judul	Perlindungan hukum Terhadap PRT Terkait Waktu Kerja Setelah Berlakunya PERMen Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2015 Mengenai Perlindungan PRT
	Tahun	2021
	Hasil Penelitian	PRT dasarnya memiliki kesamaan status dengan pekerja formal lainnya, sayangnya

		perlindungan hukum atas profesi ini tidak diatur secara jelas dalam Permenaker. Upaya hukum yang dapat dilakukan sebatas pada mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Bila upaya-upaya tersebut gagal, maka dapat mengajukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
	Perbandingan	Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Mayrani memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis terfokus pada upah bukan waktu kerja. selanjutnya penulis juga terfokus pada pengaturan mengenai upah guna untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak PRT dalam hal upah.
3.	Jenis Karya Tulis	Jurnal
	Nama Penulis	Yulianti Nur Indah Sari dan Arinto Nugroho
	Judul	Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Pengupahan Pekerja Rumah Tangga
	Tahun	2021

	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hingga saat ini, profesi pekerja rumah tangga belum diatur secara rinci, PRT masih dianggap sebagai sektor pekerja non formal yang hubungan kerjanya terjalin secara kekeluargaan, sehingga hal ini menghambat pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi PRT, utamanya mengenai upah. Melalui upaya pengesahan RUU PPRT, profesi PRT nantinya diharapkan dapat diakui sebagai profesi yang formal dan upah yang diterima dapat disesuaikan dengan aturan upah minimum serta komponen upah lainnya seperti profesi formal lainnya seperti yang diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.</p>
	<p>Perbandingan</p>	<p>Penulis akan menganalisis hal yang sama, yaitu mengenai pengaturan upah Pekerja Rumah Tangga (PRT). Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan kedepan terhadap upah bagi PRT guna memenuhi kepastian</p>

		serta perlindungan hukum bagi PRT terkait hak-hak mereka seperti upah
--	--	---

Dengan demikian, perbedaan fokus dalam penelitian dianggap telah memenuhi standar keaslian penelitian, dan dapat disimpulkan bahwa karya ini merupakan kontribusi ilmiah yang orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jika nantinya ditemukan hasil penelitian serupa atau mirip setelah penelitian ini selesai, diharapkan penelitian tersebut dapat melengkapi temuan yang ada.

H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam meneliti topik pada karya ilmiah ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni hukum dipandang sebagai teks atau sebagai kaidah yang menjadi acuan perilaku yang dianggap pantas bagi manusia dan tertuang dalam perundang-undangan. Sumitro dalam Bahder J. Nasution menjelaskan penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi perundangan yang berlaku serta upaya untuk mengidentifikasi asas-asas atau filosofi dasar dibalik perundang-undangan tersebut. Ini juga melibatkan usaha dalam menemukan aplikasi hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.²²

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: mandar maju, 2008), hlm. 86.

Penelitian normatif juga bisa dijelaskan sebagai penelitian yang mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder. Karena fokusnya pada sumber-sumber pustaka, metode ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian perpustakaan.²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, diperlukan beragam metode khusus sebagai dasar argumentasi hukum dan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif guna menemukan solusi atau menyelesaikan masalah yang terkait. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yuridis normatif kerap juga disebut sebagai pendekatan perundang-undangan. Secara esensial, pendekatan ini melibatkan analisis pada seluruh peraturan perundangan yang memiliki relevansi atas isu atau masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.²⁴ Dalam penelitian ini pendekatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan digunakan agar mampu mengeksplorasi aturan hukum terkait upah pekerja/buruh yang telah diatur secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dalam pengaturan terhadap hak upah bagi perempuan yang bekerja dalam sektor rumah tangga. Pendekatan ini membantu penulis

²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. oleh Ahsan Yunus, Edisi Revisi (Makassar: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 42.

²⁴ *Ibid.*, hlm 133.

dalam menganalisis konsistensi dan keterkaitan antara berbagai peraturan hukum.

b. Pendekatan Konseptual

Tentang pendekatan konseptual, Marzuki dalam Nur Solikin mengemukakan bahwa Pendekatan konseptual diterapkan ketika peneliti tidak membatasi diri hanya pada aturan hukum yang ada, melainkan ketika tidak ada atau belum adanya aturan yang memiliki relevansi dengan isu yang dihadapi.²⁵ Pendekatan konseptual yang dimaksud ialah mendasar dari pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam merumuskan argumentasi hukum mengenai isu yang tengah dihadapi.²⁶

Pendekatan konseptual digunakan guna mampu memahami apakah konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dengan regulasi peraturan perundangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar dari konsep-konsep hukum tersebut.²⁷ Adapun melalui karya penelitian ini, isu yang akan dianalisis adalah mengenai pengaturan upah pekerja/buruh. Apakah dalam pengaturan tersebut juga mengatur mengenai upah pekerja rumah tangga sesuai dengan konsep penerapan pengupahan yang sama tanpa diskriminasi.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 60.

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*, *Op. Cit*, hlm. 147.

²⁷ *Ibid.*

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah berguna untuk dapat menelusuri sistem hukum dan peraturan hukum masa lalu, baik yang tertulis ataupun tidak, dan masih relevan hingga saat ini. Lebih lanjut, pendekatan historis juga dimaknai dengan mempertimbangkan latar belakang objek penyidikan dan perkembangan peraturan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi.²⁸ Marzuki menegaskan, pendekatan ini dapat bermanfaat dalam membantu peneliti memahami makna aturan hukum itu sendiri dari waktu ke waktu dan memahami perubahan kerangka filosofis yang mendasari peraturan hukum tersebut.²⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Setidaknya ada tiga bahan hukum sebagai rujukan guna membantu penelitian, berikut di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundangan yang disusun berdasarkan hierarki. Memanfaatkan bahan hukum yang ada, penelitian ini merujuk pada perundangan terkait tentang upah yang layak sebagai hak pekerja. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁸ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 61

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 166.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah yang merubah UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 mengenai Pengupahan;
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 mengenai Pengupahan;
 - 7) PERMENAKER No. 2 tahun 2015 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berguna memberi penjelasan atau interpretasi dari bahan penelitian yang pertama. Bahan hukum ini meliputi buku-buku, jurnal, ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, ataupun sumber lainnya seperti ahli.³⁰ Penelitian ini terfokus pada pengaturan upah PRT.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berfungsi sebagai tambahan untuk menjelaskan dan menjadi panduan dari bahan pertama dan bahan

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Loc.Cit.*

kedua. Sumber-sumber bahan hukum tersier termasuk internet, ensiklopedia, dan kamus bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisis Bahan Hukum

Terdapat beberapa cara analisis data untuk penelitian hukum normatif, yakni dengan mengkaji dan menyesuaikan bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan. Bahan hukum yang di analisis adalah seluruh bahan hukum yang disebutkan sebelumnya secara menyeluruh terkait dengan permasalahan yang diselidiki untuk menarik kesimpulan akhir.

Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, menyesuaikan secara sistematis, menginterpretasi, dan mengevaluasi setiap jenis bahan hukum seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang relevan. Masalah penelitian tersebut adalah bagaimana regulasi perundang-undangan mengatur upah bagi PRT sebagai wujud dari penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat tersusun dan dibahas dengan terarah sehingga dapat memperjelas permasalahan yang akan dibahas pada penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan yang dipisahkan menjadi beberapa bagian, yakni:

- BAB I PENDAHULUAN** berisi uraian mengenai isu yang menjadi perhatian penulis mengenai isu yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian, selain itu diuraikan mengenai rumusan masalah yang menjadi kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian dan metode penelitian hingga sistem penulisan.
- BAB II TINJAUAN UMUM** bab ini menjelaskan secara umum tentang teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan upah bagi pekerja.
- BAB III PEMBAHASAN** Memuat uraian masalah yang ada pada bab sebelumnya. Adapun topik yang diuraikan adalah pengaturan terhadap upah bagi pekerja/buruh dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana pengaturan kedepan terhadap upah bagi PRT.
- BAB IV PENUTUP** Memuat kesimpulan permasalahan dan pembahasan pada bagian bab sebelumnya dan juga memuat saran yang berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian.